

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Adian, Donny Gahral, *Demokrasi Kami*, cetakan I, Koekoesan, Depok, 2006,
- Azhary, *Negara hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Inleiding tot de Studie van het Naderlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1966.
- Ashiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cetakan III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011- 2025*, Jakarta, 2011.
- Bennett, Walter Hartwell, *American Theories of Federalism*, University of Alabama Press, Alabama, 1964.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, cetakan I, Bina Cipta, Bandung, 1974.
- Cheema, Shabbir and Dennis Rondinelli, *Decentralization and Development*, Sage Publication, Beverly Hills, 1983.
- Craig, Paul, *Administrative Law*, Sweet and Maxwell, London, 2008.
- Damanik, Khairul Ikhwan, dkk., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Darumurti, Krishna D. dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, Pengaturan, dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Effendi, A'an, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Eko, Sutoro, *Regulasi Baru Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Gaffar Karim, Abdul, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Gunawan, Jamil, dkk., *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta, 2005.
- Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012.
- Hardiman, F. Budi, *Filsafat Fragmentaris (Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi)*, Kanisius, Yogyakarta, Cetakan V, 2011
- Harris, Syamsuddin, dkk., *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*, cetakan II, LIPI Press, Jakarta, 2004.
- Honneth, Axel, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict*, The MIT Press, Cambridge, 1995
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- , *Hukum Pemerintah Daerah*, cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2009.
- , *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta. 2010.
- , *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus*, cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2014.
- , *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Paulus Efendie Lotulung*, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, cetakan II, Mizan, Bandung, 2007.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Offset Alimni, Bandung, 1979.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Kaloh, J., *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rieneke cipta, 2007, Jakarta.
- Kartohadikusumo, Soetarjo, *Desa Indonesian Monographs*, Yogyakarta, 1988.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1973.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Kajian Telaah Kritis Penetapan Kawasan Strategis Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencanan Tata Ruang Nasional (RTRN)*, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, 2016.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, *Buku Data dan Informasi Perkembangan Daerah Tertentu Daerah Perbatasan*, Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Dan Informasi, Jakarta, 2015.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, *Data dan Peta Sasaran Desa Di Daerah Perbatasan (Berdasarkan IPD dan IDM)*, Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Dan Informasi, Jakarta, 2015.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014*. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta, 2010.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong Buku I Agenda Pembangunan nasional*, Jakarta, 2014
- Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Negara*, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Jakarta

- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 : Buku II Prioritas Pembangunan Bidang
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 Kerja Nyata Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2017
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 Narasai Kerja Pemerintah Tahun 2020, Jakarta, 2020
- Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, LPFE UI, Jakarta, 1984.
- Koesoemahatmaja, R.D.H., *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Koespramudyo, Dedy, *Strategi dan Model Pengembangan Wilayah Perbatasan Kalimantan*, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Bappenas, Jakarta.
- L. Tanya, Bernard, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV KITA, Surabaya, 2007.
- LS, Syahda Guruh, dkk., *Otonomi Yang Luas dan Mandiri Menuju Indonesia Baru*, Tarsito, Bandung, 2000.
- Maddick, Hendry, *Democracy, Decentralization and Development*, Asia Publishing House: Reprinted London, 1966.
- Manan, Bagir, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, UNSIKA, Karawang, 1993.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2001
- Maharjan, Keshaf Lall, *Desentralization and Rural Development in Indonesia*, Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore, 2017.
- M. Hadjon, Philipus, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, cetakan VII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- , *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

- MD, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Ketatanegaraan*, Rieneke Cipta, Jakarta, 2000.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2010,
- , *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan I, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Maschab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Polgov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
- Mawhood, Philip, *Local Government in the Third World*, Jhon Wisley and Sons Chicester, UK, 1983.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2016.
- Montesquieu, Baron de, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam). Bandung: Nusa Media, tanpa tahun.
- Muslimin, Amrah, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986.
- Nasution, Mirza, *Pertanggung Jawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, cetakan I, PT Sofmedia, Jakarta.
- Ndaraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rieneke Cipta, Jakarta, 2003.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah: Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Peradaban*, Jakarta, 2002.
- Novianto, Widhi, dkk., *Telaah Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara*, Jakarta, 2015
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, cetakan II, Bumi Aksara, 2008.
- P. Siagian, Sondang, *Filsafat Administrasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

- Palupi, Sri, dkk., *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama*, Jakarta, 2016.
- Page dan Goldsmith, *Central and Local Government Relation*, Sage Publication, London, 1987.
- Philips, O. Hood, Paul Jackson, dan Patricia Leopold, *Constitutional and Administrative law*, 8th edition, Sweet and Maxwell, London, 2001.
- Prasojo, Eko, *Federalisme dan Negara Federal – Sebuah Pengantar*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cetakan V, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2000.
- Raharusun, Anton, *Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Studi terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012*, cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Rasjidi, Lili, dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, cetakan XII, PT CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2016.
- Rasyid, Ryaas, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Rienow, Robert, *Introductional to Government*, Alfred A. Knoof, New York, 1966.
- Roy and Joseph S. Raoucek, *An Introduction to Politic*, New York, 1951.
- Salman, Otje, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004.
- Syaukani, dkk., *Otonomi Daerah dan Negara Keatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015.
- Simanjuntak, Antonius, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba hingga 1945: Suatu Pendekatan Antropologi Budaya dan Politik*, Buku Obor, Jakarta, 2006.
- Suaedy, Ahmad, dkk., *Desa Kontra Urbanisasi Wajah Empat Pelayanan Publik Dasar Pendidikan, Kesehatan, Administrasi Pertanahan, Administrasi Kependudukan, Ombudsman Republik Indonesia*, Jakarta, 2018.
- Sudiar, Sonny, Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Kerja Sama Pembangunan Internasional Di Wilayah Perbatasan Negara, Pustaka Radja, Surabaya, 2013

- Sukriono, Didik, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi : Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press, Jakarta, 2013.
- Surianingrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, cetakan IV, Rieneke Cipta, Jakarta, 1992.
- Suseno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- , *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987
- Sumarsono, Soni, *Kebijakan Umum Pengelolaan Lintas Batas Negara*, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta, 2012
- Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.
- , *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soejito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Study of the History And Existing Form*, 5th Printed, Sidwick & Jackson Limited, London.
- , *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, cetakan II, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Suhartono, Pilkades, Pemilu, dan Dengue, Kompas, Jakarta, 2001.
- Sumpeno, Wahjudin, dkk., *Modul Pratugas Pendamping Desa (Kompetensi Umum)*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Utomo, Warsito, *Kajian Kritis RUU Pemerintahan Daerah dan Implikasinya Terhadap Tata Pemerintahan yang Demokratis: Dalam Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar dan YAPIKA dan Forum LSM DIY, Yogyakarta, 2006.
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

- Wahidin, Samsul, *Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, cetakan I, Pustaka Pelajar, 2013, Yogyakarta.
- Wheare, K.C., *Federal Government*, Oxford University Press, London, 1953.
- Widodo, Joko, *Good Governance*, Insan Cendekia, Surabaya, 2003.
- Widjaja, HAW, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Wignosubroto, Soetandyo, dkk, 2005, *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2005.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I, Prapanca, Jakarta, 1959.
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada, Cetakan V,
- Yasin, Muhammad, dkk., *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Jakarta, 2015.
- Zakaria, R. Yando, *Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*, ELSAM, Jakarta, 2000.
- Zuhro, Siti, *Demokrasi Lokal Perubahan Dan Kestinambungan Nilai Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan Dan Bali*, Yogyakarta, Ombak, 2009

B. Disertasi dan Tesis

- Kurnia Warman, “Pengaturan Sumber Daya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum)”, 2009, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Umbu Rauta, “Rekonstruksi Sistem Pengujian Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
- Abrar, “Hak Pengusaan Negara Atas Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999.

Bambang Kuncoro,”Hubungan Desa dan Negara Studi Relasi Kekuasaan Kepala Desa dan Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pasca Orde Baru”, Ringkasan Disertasi, Progam Doktor ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Sudi Fahmi, “Konsistensi Pengaturan Penyerahan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (Studi Desentralisasi Bidang Kehutanan Di Provinsi Riau), 2006, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

King Faisal Sulaiman,”Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung Dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, 2016, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Suharti, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Pati”, 2008, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Mohd. Arsyad,”Pengaturan dan Pelaksanaan Otonomi Desa di Pemerintahan Indragiri Hilir Provinsi Riau”, 2009, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Afdhal Mahatta,”Eksistensi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”, 2012, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Neni Yuhertlis,”Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat)”, 2013, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.

C. Jurnal dan Makalah

Agus Kusnadi, “Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” (2015) 2:3, PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum.

Azmi Fendri, "Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) Sebagai Perwujudan Nilai Moral dan Etika", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 3 September 2014-Januari 2015

Budiyono, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah, "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah", (2015) 67:18, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala*.

Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," (2011) 4:1, *Jurnal Konstitusi*.

Edie Toet Hendratno, "Desentralisasi Yang Mengarah Ke Federal dan Pengaruhnya Terhadap Fungsi Negara", *Jurnal Hukum Internasional* Volume 4 Nomor 2 Januari 2007

Elviandri, Khuzdaivah Dimiyati, Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 31 Nomor 2, Juni 2019

Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV Universitas Parahyangan*, Bandung, 2000.

Hasrat Arif Shaleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah", *Government Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2008.

I Gede Wahyu Wicaksana, "Kedaulatan Teritorial Negara: Kepentingan Material dan Nilai Simbolik", *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik* Volume 29 No. 2 Tahun 2016

Kushandajani, "Implikasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa", (2015) 4:2 *Jurnal Hukum Yustisia Indonesia Universitas Sebelas Maret*.

Kushandajani, "Rekonstruksi Hukum Pemerintahan Desa: Pemikiran Perubahan Kebijakan Bagi Desa, *Politika: Jurnal Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, Vol 2. No 1, 2013

Mohammad Agus Yusoff, dkk., "Conceptualizing Decentralization And It's Dimension," (2016) *International Business Management* 10 (6) : 692701, Meadwell Journals.

Muhammad Fauzan, "Titik Berat Otonomi Pada Daerah Provinsi Dalam Distem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Media Hukum* Volume 23 Nomor 1 Juni 2016

Ni'matul Huda, "Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017

Otong Rosadi, "Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tak Kunjung Selesai", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2015

Rifqi Ridlo Phahlevy, "The Concept of Village Autonomy Indonesia (Indonesian Constitution Perspective)", (2016) 3:1, *Rechtidee Law Journal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.

Sally Falk Moore, "Law And Social Change: The Semi Autonomus Social Field As An Aproprate Subject Of Study," 7 *Law & Soc'y Rev.* 719 1972-1973.

Sutaat, "Pemberdayaan Masyarakat Daerah Perbatasan Antar Negara; Studi Masalah Kebutuhan dan Sumber Daya Sosial Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat", *Jurnal Sosiokonsepsia* Vol. 17 No. 1 Tahun 2012.

Sonny Sudiar, "Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Pebatasan Darat Di Provinsi Kalimantan Utara", *Jurnal Administrative Reforma* Vol. 3 No. 4, Oktober-Desember 2015

Yuslim, "Gagasan Pengaturan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945," (2013) 2:2, *Jurnal Hukum Yustisia Indonesia Universitas Sebelas Maret*.

Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Darerah", *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015

Jacqueline Vel, Yando Zakaria, Adriaan Bedner, "Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law", (2017) 4:2, *Asian Journal Of Law and Society*.

Aaron Schneider, "Decentralization: Conceptualization and Measurement", *Studies in Comparative International Development Journal*, Fall 2003, Vol. 38, No. 3

Zainal, "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)", *Jurnal TAPiS* Vol.12 No. 1 Januari-Juni Tahun 2016.

Rian Adhivira Prabowo, "Politik Rekognissi Axel Honneth: Relevansinya Terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum Indonesia", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 September 2019

Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah", Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Penataan Ruang", Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei Tahun 2000.

Philippus M. Hadjon, "Makalah Sistem Pembagian kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)"

Bayu Kardias Daniardi, "Desentralisasi Asimetris Di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Seminar Lembaga Administrasi Negara Jatinangor tanggal 26 November 2012.

Hanif Nurkholis, "Tantangan dan Prospek Implementasi UU No. 6/2016 tentang Desa," makalah di sampaikan dalam Seminar Nasional Administrasi Negara di FISIP Universitas Negeri Padang, 13 November 2014.

Suteki dan Awaluddin Marwan, "Ronald Dworkin: Pertarungan Yang Kodrat dan Yang Positif", Makalah Pleno Konferensi Ke-III Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Surabaya, Tgl 27-28 Agustus 2013, Universitas Airlangga

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, "Paparan Dirjen PMD Tentang Cluster RUU Desa", Bahan Presentase Panitia Kerja RUU Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, "Tinjauan Sejarah Mengenai Pengaturan Desa dan Keberadaan Desa Adat Di Indonesia", Kertas Kerja yang Disampaikan Pada Pembahasan Cluster RUU Tentang Desa dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 30 Januari 2013

D. Laporan dan Risalah Sidang

Agus Salim, dkk., "Indonesia's Village Law: enabler or constraint for more accountable governance?", 2017, Making All Voice Account Research Report, The Institute Development Study, brighton.

Institute For Research and Empowerment, Background Study Report Review Penyusunan RPJMN 2020-2024 Lingkup Daerah Bidang Tertinggal Kawasan Perbatasan, Desa, dan Kawasan Perdesaan, dan Transmigrasi, IRE, Yogyakarta, 2019

Robert A. Simanjuntak, "Implementasi Desentralisasi Fiskal : Problema, Prospek, dan Kebijakan", 2003, Working Paper No. 4/2003 LPEM-UI.

Policy Brief, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP-USAID), Masukan Untuk Perumusan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, 2007.

United Nation Development Programme, "Decentralitation A Sampling of Defenition", 1999, Working Paper UNDP.

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Naskah Akademik RUU Desa, Departemen Dalam Negeri, 2007.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian dalam Negeri, Jakarta, 2011

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Buku 1 Agenda dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Muchlis Hamdi, dkk., Naskah Akademik RUU Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, tanpa tahun

Mahendra Putra K., "Politik Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Geospasial", Ringkasan Laporan Hasil Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010, Universitas Brawijaya, Malang

Risalah Persidang Panitia Kerja DPR RI RUU Desa Agenda Penjelasan Pemerintah Atas Tanggapan DPR Mengenai Cluster II dan III tanggal 24 Februari tahun 2013

DPR RI, Risalah Sidang Pembahasan RUU Desa dan Daftar Inventasi Masalah RUU Desa, Seketariat Pansus DPR RI, 2012

Risalah Persidangan Panitia Kerja DPR RI RUU Desa dalam Agenda Penyampaian Keterangan Pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Panitia Khusus RUU Desa tanggal 2 April tahun 2012

Risalah Persidang Panitia Kerja DPR RI RUU Desa dalam Agenda Penyampaian Keterangan Pemerintah dalam Raker dengan Pansus RUU Desa tanggal 2 April tahun 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Risalah Persidang Agenda Rapat Kerja Pemerintah Antara Panitia Khusus DPR RI RUU Desa dan DPD tanggal 4 April 2012

Risalah Persidang Panitia Kerja DPR RI RUU Desa Agenda Penjelasan Pemerintah Terkait Kluster II RUU Desa Tentang Penatan Desa, Kewenanga Desa serta Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa Tanggal 22 Februari 2013

Risalah Persidang Panitia Kerja DPR RI RUU Desa Agenda Penjelasan Pemerintah Atas Tanggapan DPR Mengenai Cluster II dan III tanggal 24 Februari tahun 2013

E. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penataan> diakses pada Tanggal 13 Maret 2019 Pukul 20:00 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42046/4/Chapter%20II.pdf>, (terakhir kali dikunjungi pada 27 Mei 2019 Pukul 20:48 WIB).

Website Oxford Dictionary; <https://en.oxforddictionaries.com/definition/decentralization> (terakhir kali dikunjungi pada 24 Mei 2019 Pukul 23:11). Lihat juga website Cambridge Dictionary; <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/decentralize> (terakhir kali dikunjungi pada 24 Mei 2019 Pukul 23:11).

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

